

**“INDUK SEMANG” SEBUAH MODEL
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KELOMPOK NELAYAN
JAKAT MAKMUR KOTA BENGKULU TAHUN 2013**

Yessilia Osira¹, Desy Afrita² dan Novi Hendrika Jayaputra³

Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Jl. WR Supratman, Kandang Limun Bengkulu

¹yosira@hotmail.com; ²d_afrita@yahoo.co.id; ³novihendrika@yahoo.com

Abstract

Pantai Jakat is located in Kelurahan Bajak and Kelurahan Pasar Bengkulu in Bengkulu Municipality. In this area, there will be found informal activities done by workmen in which they are rentant of risk economically and socially, it means that they need any protection. One of informal sector in this areas are fishermen. This study is to analyze the model of social protection for that fisherman.

This article was result of an action research with qualitative approach. Data collected from interview, observation, group focused discussion, and library research. It using to analyze the model of protection for fishermen including such as (1) fishermen profile, (2) problems/need of fishermen as an informal sector workmen, (3) potency and source of social protection for these workmen, (4) planning the following steps for the protection. The data valided by credibility test, transferrability test, dependability test, and confirmability test. Data processed and analyzed as qualitatively.

The result showed that fishermen had got risks economically and socially. Most of the risk was natural disasters such as stromy, losing canoe and net, and trawl. However, these workmen, has got potency, ability, and source for protection to anticipate the risks by grouping in a group of fishermen, group of vendor, wider access to the social insurance from government, assitancy from government and society. By comparing the problems/needs, potency, and source system, it was formulated a model for these workmen, especially fishermen. This model was modified from the system of "induk semang" that combined to the capacity of fishermen through groups organizing was done by involving actively the group of fishermen, induk semang, society, government, and so on.

Keywords: social protection, "induk semang", fishermen

Abstrak

Pantai Jakat berada di wilayah Kelurahan Bajak dan Kelurahan Pasar Bengkulu Kota Bengkulu. Pada kawasan ini ditemukan aktifitas pekerja sektor informal yang mengalami berbagai kerentanan, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga membutuhkan berbagai upaya perlindungan sosial. Salah satu pekerja sektor informal di kawasan ini adalah nelayan. Secara khusus penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan sosial bagi nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu.

Artikel ini merupakan hasil penelitian tindakan (*action research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi untuk mengkaji tentang: 1) profil nelayan, 2) masalah/kebutuhan nelayan, 3) potensi dan sumber perlindungan sosial bagi nelayan dan 4) menyusun rencana tindak lanjut perlindungan sosial bagi nelayan. Validasi data dilakukan melalui uji kredibilitas, dan uji dependability. Data kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan mengalami berbagai kerentanan, seperti halnya pekerja sektor informal lainnya yang tidak terlindungi secara ekonomi maupun sosial. Bagi nelayan,

kerentanan tersebut lebih diakibatkan oleh risiko kondisi alam yang tidak menentu seperti badai, risiko kerusakan/hilangnya kapal dan jaring, risiko persaingan usaha dengan adanya kapal *trawl* yang menggunakan pukot harimau, yang kesemuanya mempengaruhi hasil tangkapan. Meskipun demikian, nelayan juga mempunyai potensi, kemampuan dan sumber perlindungan sosial untuk mengantisipasi risiko-risiko yang ada, seperti adanya kelompok nelayan, kelompok pedagang, adanya “induk semang” bagi nelayan-nelayan yang tidak mempunyai kapal dan jaring sendiri, adanya peluang akses terhadap jaminan kesehatan masyarakat dari pemerintah, serta berbagai bantuan pemerintah dan masyarakat. Dengan menyandingkan antara permasalahan/kebutuhan, potensi, dan sistem sumber yang dapat dijangkau, maka dapat dirumuskan alternatif model perlindungan bagi pekerja informal khususnya nelayan. Model ini merupakan modifikasi dari sistem” induk semang” yang dipadukan dengan penguatan kapasitas nelayan melalui kelompok. Pengorganisasian ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif kelompok nelayan, induk semang, masyarakat, pemerintah dan pihak lain yang terkait.

Kata kunci: perlindungan sosial, induk semang, nelayan

Pendahuluan

International Confernce of Labour Statisticians (ICLS) 1993 dalam ILO (2002) memberi definisi bahwa informal sektor adalah:

"Unit engaged in the production of goods and services with the primary objective of generating employment and incomes to the person involved. This unit typically operate at a low level of organization, with little or no division between labour and capital as faktors of production and on a small scale. Labour relation- where they exist- are based mostly on casual employment, kinship or personal, and sosial relation rather than contractual arrangements with formal guarantees."

Pekerjaan sektor informal merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Kondisi ini juga terjadi di wilayah pesisir Bengkulu, tepatnya Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu. Di Kawasan tersebut, dengan mudah kita jumpai para pekerja sektor informal, meliputi, nelayan, pedagang asongan, pedagang warungan, pengamen, penjual ikan segar, penarik lancang, tukang ojeg, dan jasa wisata laut.

Pekerja sektor informal tersebut mengalami berbagai keterbatasan-keterbatasan dan berbagai permasalahan/kebutuhan yang terwujud dalam berbagai bentuk kerentanan yang harus dihadapi, baik ekonomi maupun sosial. Kerentanan atau kerawanan tersebut akan memicu munculnya permasalahan yang bukan saja dialami oleh pekerja sektor informal dan keluarganya, tetapi juga akan menimpa masyarakat di sekitar mereka. Atas dasar tersebut, maka diperlukan model perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.

Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian tentang Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu Tahun 2013. Dalam artikel ini Peneliti mengkhususkan diri pada pembahasan model perlindungan sosial bagi nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu.

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Model Perlindungan Sosial bagi Nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu”, selanjutnya dirinci menjadi sub-sub permasalahan sebagai berikut; 1) Bagaimana profil nelayan di di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu?, 2) Bagaimana masalah/kebutuhan nelayan di di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu?, 3) Bagaimana potensi dan sistem sumber perlindungan sosial

bagi nelayan di di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu?, dan 4) Bagaimana rencana tindak lanjut perlindungan sosial bagi nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu?

Melalui penelitian ini diharapkan terbentuk model perlindungan sosial bagi nelayan di di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan dan pengayaan obyek-obyek kajian praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, khususnya dalam implementasi Community Organization/Community Development (CO/CD) pada pekerja sektor informal.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam tentang perlindungan sosial bagi nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi untuk mengkaji tentang: 1) profil nelayan, 2) masalah/kebutuhan nelayan, 3) potensi dan sumber perlindungan sosial bagi nelayan dan 4) menyusun rencana tindak lanjut perlindungan sosial bagi nelayan. Validasi data dilakukan melalui uji kredibilitas, dan uji dependability. Data kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Pembahasan

Pantai Jakat merupakan kawasan wisata yang terletak di wilayah Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut dan wilayah Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, menghadap langsung ke Samudra Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nelayan yang beraktifitas di Kawasan Pantai Jakat ini secara garis besar terdiri dari 2 kelompok nelayan, yaitu Kelompok Nelayan Kelurahan Pasar Bengkulu dan Kelompok Nelayan Kelurahan Bajak.

Data Profil Kelurahan Bajak tahun 2012 menyebutkan ada sekitar 22 orang yang

tercatat sebagai nelayan, yang dibuktikan secara administratif dengan kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang secara eksplisit menjelaskan pekerjaan sebagai nelayan. Kenyataannya, menurut Ketua Kelompok Nelayan Jakat Makmur Kelurahan Bajak, jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan mencapai 30 orang lebih. Perbedaan ini disebabkan karena sebagian nelayan tidak mempunyai KTP yang menyebutkan pekerjaannya sebagai nelayan. Sementara itu di Kelurahan Pasar Bengkulu, dari data Profil Kelurahan Pasar Bengkulu Tahun 2012, menyebutkan ada 188 orang penduduk berprofesi sebagai nelayan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu mengalami berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan dan antisipasi bersama, bukan saja oleh nelayan sendiri, tetapi juga pemerintah, dan pihak lain yang peduli dengan kehidupan nelayan. Permasalahan/kebutuhan tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kerentanan-kerentanan dalam kelangsungan aktifitas pekerjaannya di Kawasan Pantai Jakat. Secara umum kerentanan yang dialami oleh nelayan tersebut meliputi kerentanan akibat alam, dan kerentanan sosial. Kehidupan nelayan tradisional tersebut akan mengalami gangguan akibat cuaca buruk seperti terjadi badai laut atau gempa bumi yang berpotensi tsunami. Di samping itu juga ada kerentanan akibat interaksi sosial yang tidak harmonis antar nelayan maupun dengan pemerintah dan pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan/kebutuhan nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu diantaranya meliputi:

1. Ketiadaan alat tangkap, dan atau atau risiko terjadinya kerusakan peralatan melaut, seperti kerusakan pada kapal dan jaring

Sebagaimana diketahui, kepemilikan terhadap kapal, jaring, atau alat pancing adalah sebagian dari perlengkapan utama nelayan dalam melakukan aktifitasnya.

Bapak Aulia (salah satu pengurus Kelompok Nelayan Jakat Makmur) menjelaskan bahwa:

“permasalahan nelayan tu alat tangkap ikan sudah mulai tua dan rusak....pakaian atau kostum nelayan juga tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan”

Di samping itu, peneliti juga menemukan beberapa nelayan yang tidak mempunyai perlengkapan nelayan sendiri. Umumnya kondisi ini terjadi karena nelayan tidak mampu membeli kapal dan perlengkapan lainnya akibat harganya yang mahal sehingga tidak terjangkau. Situasi ini juga dipersulit dengan penghasilan nelayan saat ini yang dapat dikatakan sangat tidak menentu.

Kepemilikan alat tangkap saja belum menjamin tangkapan ikan yang banyak. Umumnya kapal (atau biasa disebut lancang) masih bersifat tradisional mengandalkan kekuatan tenaga mendayung, sehingga daya jelajahnya juga terbatas. Bagi nelayan yang cukup mampu maka ia akan melengkapi lancangnya dengan mesin bermotor untuk memperjauh wilayah tangkapan. Menurut informan, saat ini jumlah ikan semakin sedikit dan keberadaannya pun semakin ke tengah, sehingga nelayan harus melaut semakin jauh dari bibir pantai.

2. Ketidakpastian pemasaran hasil tangkapan ikan

Nelayan memasarkan ikan hasil tangkapannya dengan bermacam-macam cara, ada yang langsung dijual ketika kapal mendarat, ada yang dijual ke pasar, dan ada juga yang ditampung oleh “induk semang”. Istilah induk semang adalah sebutan lain untuk juragan pemilik kapal atau modal melaut.

Meskipun pemerintah sudah membangun Pusat Pelelangan Ikan (PPI), yang diperuntukkan sebagai lokasi resmi tempat pelelangan ikan bagi kawasan pesisir Kota Bengkulu, tetapi nelayan jarang

mengaksesnya. Salah seorang nelayan yang ditemui mengatakan:

“PPI yang dibangun pemerintah ternyata kurang berfungsi bagi kami nelayan Pantai Jakat, terutama nelayan dari kelurahan Pasar Bengkulu dan dari Kelurahan Bajak...karena lokasinya terlalu jauh dari tempat mendaratnya kapal....kan membutuhkan ongkos untuk membawa ikan dari kapal ke PPI...belum lagi kalau hasil tangkapan ikannya sedikit....bukannya menguntungkan kami tapi bisa membuat kami jadi rugi..”

Jauhnya jarak PPI dengan tempat pendaratan lancang, membuat nelayan enggan untuk mengoptimalkan fungsi PPI, apalagi umumnya pembeli sudah langsung mendatangi nelayan dan membeli ikan hasil tangkapan.

3. Ketidakpastian melaut yang diakibatkan oleh faktor alam, seperti badai dan musim paceklik ikan

Hampir semua nelayan di kawasan Pantai Jakat terkategori sebagai nelayan tradisional. Kondisi ini menempatkan sangat tergantung pada kemurahan alam. Kondisi alam, seperti pergiliran musim ikan dan badai, masih menjadi kendala utama. Ketika ditanya tentang masalah yang dihadapi nelayan, Bu Zuraidah (istri nelayan) mengatakan:

“ masalah yang sering diadok kek nelayan banyak ko kareno alam, misalnya badai. Gara-gara badai tobo nelayan idak ke laut, akibatnyo kebutuhan perut ko masih kurang.. Kadang melaut 2 minggu, di daratan juga 2 minggu....“

Situasi alam ini diakui semakin buruk, terutama tahun-tahun belakangan ini dimana laut semakin sering terjadi badai. Jika dikaitkan dengan situasi global, dapat dipahami dengan mencermati kecenderungan pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara ekstrim. Bagi nelayan tradisional situasi alam ini cenderung disikapi dengan pasrah, karena

mereka minim pengetahuan maupun kepemilikan peralatan dengan teknologi modern.

Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan Bpk. Darwan Ferdhiansyah (ketua Kelompok nelayan Jakat makmur)

“Kendala lain nelayan adalah musim paceklik (biasanya musim kemarau) karena tangkapan ikan makin sedikit. Pada musim ini rata-rata nelayan mendapatkan uang 500 ribu sampai 600 ribu selama sebulan (dalam sebulan melaut sekitar 20 hari). Dalam sehari, modal berangkat (BBM) sekitar 20-30 ribu, tapi kadang hasilnya malah minus....”

Bagi nelayan yang sudah cukup mapan, musim paceklik bukanlah kendala, karena mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas wilayah dan jumlah tangkapan ikan. Teknologi yang biasa dipakai seperti *fishfinder* yang dapat menggunakan signal tertentu untuk menunjukkan dimana lokasi ikan berada. Biasanya penggunaan *fishfinder* dilengkapi dengan GPS dan kapal motor yang memiliki kekuatan besar, artinya paceklik di wilayah sekitar pinggir dapat diatasi dengan melaut lebih ke tengah. Namun sayangnya alat-alat modern seperti *fishfinder*, GPS, dan motor kapal, harganya masih cukup mahal berkisar Rp 6.000.000,-an untuk kualitas standar. Semakin baik kualitasnya, maka semakin mahal pula harganya.

4. Kerawanan terjadinya konflik

Konflik dikalangan nelayan umumnya masih bersifat laten. Hasil pendataan menunjukkan bahwa ada potensi konflik yang terjadi antara nelayan dengan pengelola kawasan wisata Pantai Jakat. Permasalahannya berkaitan dengan penetapan garis batas yang tidak bisa menjadi lokasi pendaratan kapal nelayan. Potensi konflik juga ditemukan dalam kelompok nelayan. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Abu Bakar (nelayan):

“Pengalaman yang sudah ada menjadikan nelayan menjadi apatis

dengan adanya perkumpulan nelayan, karena perkumpulan tersebut seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pengurusnya saja. Meskipun demikian dengan dasar kepercayaan, nelayan ini masih saling bekerja sama dalam melaut”.

Pernyataan tersebut diperkuat juga dengan pernyataan Apriansyah (nelayan)

“Perkumpulan nelayan sudah ada sejak dulu dengan anggota sekitar 27 orang nelayan. Dikarenakan berbagai faktor, seperti pengurus meninggal dunia, pengelolaan keuangan yang tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan antara pengurus dan anggota”.

Pernyataan lain yang menunjukkan adanya konflik yang terjadi didalam kelompok nelayan adalah ungkapan Bu Zuraidah (istri nelayan) yang menjelaskan bahwa dulu pernah ada perkumpulan nelayan, tetapi semenjak ketuanya meninggal dunia, maka perkumpulan tersebut tidak berjalan lagi:

“Perkumpulan nelayan ko kini idak aktif lagi, semenjak ketua nyo pak rizki meninggal, kalu bapak (Bpk Abu Bakar) posisinya sebagai wakil, sedangkan sekretarisnya masih dipegang kek anak kito jugo, Apriansyah namonyo.. Untuk kini ko dengar-dengar kalu idak salah lah ado kepengurusan baru,tapi belum ado kumpul-kumpul lagi... Setau sayo ngumpul secaro rutin untuk kelompok ko idak ado, Cuma kemaren katonyo ado bantuan dari pemerintah, makonyo sempat ngumpul jugo, tapi kami idak tau apo bantuan tuh lah ado apo belum, biasonyo dimakan kek yang diate ate tulah, ...Kalu tentang iuran rutin anggota sampai kini idak ado, tapi kepengurusan yang dulu ado , Cuma keuangannya idak jalas, makonyo kami lah male kareno idak jelas”...

Kutipan beberapa ungkapan informan tersebut menggambarkan bahwa pada intinya ada banyak persoalan di internal kelompok nelayan. Persoalan yang dikemukakan terutama berkenaan dengan manajemen pengelolaan organisasi yang belum profesional. Indikatornya adalah minimnya pengkaderan, sehingga kelompok bertumpu pada orang tertentu, ketika orang yang diandalkan tidak ada maka kelangsungan kelompok pun dipertanyakan. Pola kepemimpinan yang tidak transparan dan hidden agendas yang cenderung memanfaatkan kelompok untuk kepentingan pribadi, juga menjadi penanda buruknya manajemen pengelolaan kelompok. Situasi-situasi inilah yang secara berkelanjutan menyebabkan banyak nelayan kemudian enggan dan apatis terhadap kelompok. Padahal idealnya kelompok mestinya mampu menjembati berbagai persoalan anggota dan menjadi media bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama.

5. Keberadaan kapal trawl yang menggunakan pukot harimau.

Keberadaan kapal trawl dengan jaring pukot harimau yang beroperasi di pinggiran pantai sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran hukum. Kapal tersebut mampu menangkap ikan sampai yang berukuran kecil tanpa menyisakan apapun, sehingga nelayan tradisional, yang hanya menggunakan peralatan seadanya tidak akan mendapatkan ikan.

Di samping itu kapal trawl dengan jaring pukot harimau juga akan merusak terumbu karang yang ada. Kerusakan ini membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk dapat diperbaiki. Padahal terumbu karang adalah tempat bersarangnya ikan-ikan. Seperti halnya penelitian sejenis lainnya, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan kapal trawl ini telah menimbulkan konflik dan mengancam kelangsungan mata pencaharian bagi nelayan tradisional.

Bapak Abu bakar (nelayan) menyatakan bahwa:

“....Sekarang ini melaut tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.... Hal ini terjadi sejak adanya kapal yang menggunakan “pukat harimau” sehingga nelayan kecil tidak mendapatkan tangkapan ikan yang memadai. Kelompok nelayan pernah melakukan pembakaran kapal yang menggunakan “pukat harimau”, tetapi tetap masih ada kapal-kapal yang menggunakannya.”Penggunaan “pukat harimau” tu akan merusak kehidupan laut, ikan kecil bahkan telur ikan dan terumbu karang ikut rusak sehingga membutuhkan waktu yang lama (sampai 30 tahunan) untuk memperbaiki...lalu apa kerjaan nelayan selama itu apabila lautnya rusak?.....Kelompok nelayan ini menginginkan adanya pengaturan penggunaan alat tangkap ikan...mestinya orang mengikuti cara kami dalam menangkap ikan, seperti menggunakan jarring, atau pancingan, bukannya menggunakan alat yang bisa mengganggu kelangsungan kehidupan laut yang akhirnya nelayan juga yang sengsara....”

Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa pada prinsipnya nelayan sangat memahami arti kelestarian laut dan potensi bahari lainnya, serta betapa keberadaan kelompok nelayan penting bagi pencapaian tujuan bersama. Namun persoalannya tidak akan dapat diselesaikan dengan pemahaman tradisional semata, harus ada campur tangan pemerintah melalui regulasinya yang adil. Perlu ada sanksi yang tegas bagi pemakai trawl, dan juga perlu ada penguatan kapasitas bagi nelayan tradisional.

6. Kesulitan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal nelayan

Salah satu hal yang juga mempengaruhi aktifitas nelayan adalah ketersediaan BBM yang terjangkau bagi nelayan untuk

melaut. Pada kenyataannya hal ini masih belum terpenuhi. Hal ini bisa terlihat dari pernyataan Bapak Arfani (nelayan):

...Kami nelayan sering kesulitan mendapatkan BBM (solar), kami membeli solar sekitar 3-5 liter untuk sekali berangkat melaut, tetapi tidak terlayani dengan baik oleh pihak SPBU... Karena SPBU lebih mendahulukan orang yang membeli BBM “berjerigen-jerigen”.....

7. Kelemahan administrasi kependudukan

Salah satu syarat yang umumnya digunakan oleh pemerintah ketika akan memberikan bantuan sosial adalah kelengkapan administrasi kependudukan. Hal inilah yang sering menjadi kelemahan kelompok nelayan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti terhadap Bapak Ahmad Kusen STTP, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa:

“...Data tahun 2013 menunjukkan ada sekitar 22 Kelapa keluarga di Kelurahan Bajak yang berprofesi sebagai nelayan, tetapi hanya ada 10 KK yang memiliki kartu tanda penduduk yang menyebutkan pekerjaannya sebagai nelayan (sebagian besar malah menyebutkan pekerjaannya sebagai nelayan dalam KTP)...”

Bapak. Darwan Ferdiansyah (ketua kelompok nelayan Jakat Makmur) menjelaskan bahwa :

“.....KTP yang menyebutkan pekerjaannya sebagai “nelayan” merupakan salah satu kendala yang dihadapi nelayan ketika mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah. ...Saat ini ada sekitar 15 orang yang mempunyai KTP nelayan.....”

“.....Nelayan merasa bahwa proses mendapatkan bantuan pemerintah melalui prosedur yang berbelit-belit

sehingga nelayan merasa menjadi “peminta-minta”.....”

Meskipun kehidupan nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu mengalami berbagai permasalahan/kebutuhan akibat kerentanan-kerentanan yang ada, tetapi pada dasarnya mereka juga memiliki potensi/kemampuan dan juga sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi/kemampuan dan sumber yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan, diantaranya:

1. Keberadaan “induk semang”

Di kalangan nelayan ada istilah “induk semang”, yaitu orang yang meminjamkan uang dan atau peralatan melaut (kapal, jaring) sekaligus juga menampung hasil melaut nelayan. Ada dua model yang dijalankan oleh “induk semang”, yaitu:

- a. Pinjaman diberikan dengan catatan hasil melaut dijual ke induk semang. Keuntungan model ini:
 - 1) Hasil melaut apapun kondisinya, berapapun harganya akan ditampung oleh induk semang dengan harga yang kompetitif.
 - 2) Risiko kerusakan peralatan hasil pinjaman ditanggung bersama oleh nelayan dan induk semang.
 - 3) Apabila hasil melaut tidak memadai, nelayan bisa meminta waktu yang memadai dalam pengembalian pinjaman.
- b. Pinjaman diberikan tanpa catatan hasil melaut dijual ke induk semang. Kelemahan model ini:
 - 1) Risiko kerusakan peralatan hasil pinjaman menjadi tanggungan nelayan sepenuhnya.
 - 2) Tidak ada keringanan dari induk semang dalam pengembalian pinjaman, meskipun hasil melaut tidak memadai.
 - 3) Apabila pasar sedang lesu, hasil melaut tidak mendapatkan jaminan diterima oleh induk semang.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak Kasmedi (Ketua LPM Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu), menyebutkan bahwa :

“.....Induk semang” di Kelurahan Pasar Bengkulu membantu sekitar 10 – 20 nelayan lancang. Pengelolaan yang dijalankan oleh “Induk Semang”, sampai saat ini masih dalam kewajaran atau baik-baik saja...jadi kekhawatiran bahwa “induk semang” akan menjadi “lintah darat” belum terbukti....justru keberadaannya sangat membantu nelayan-nelayan kecil.....”

Sementara itu, Bapak Darwan Ferdhiansyah, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Nelayan Jakat Makmur, menjelaskan bahwa keberadaan “induk semang” sangat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh nelayan kecil yang umumnya mempunyai banyak keterbatasan diantaranya tidak mempunyai kapal dan jaring sendiri. Keterbatasan kepemilikan alat tangkap ini selanjutnya menyebabkan nelayan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesulitan ini semakin parah manakala cuaca tidak mendukung seperti badai, atau biasa juga disebut nelayan dengan musim paceklik ikan. Sebaliknya bila ikan berlimpah, nelayan tradisional juga mengalami permasalahan berupa kesulitan dalam menjual hasil tangkapan ikannya. Jika ikan-ikan tidak segera terjual maka resikonya akan busuk, artinya kerugian akan bertambah. Semestinya resiko ini dapat diantisipasi dengan pengolahan ikan tangkapan, namun terbentur dengan minimnya pengetahuan, keterampilan dan permodalan usaha pengolahan.

2. Adanya “nilai-nilai kepercayaan” dalam kehidupan.

Salah satu nilai-nilai kehidupan penting yang ada dan berkembang di antara kehidupan nelayan dan masyarakat di Kawasan Pantai Jakat Bengkulu adalah

adanya kepercayaan yang tinggi terhadap sesama nelayan. Ada solidaritas yang kuat yang mendorong mereka untuk berjuang bersama-sama dalam menghadapi kerentanan-kerentanan yang ada. Hal ini terlihat dari kepercayaan yang diberikan oleh “induk semang” kepada nelayan ketika memberikan bantuan tidak dengan pencatatan yang baik. Kepercayaan ini juga diberikan oleh penjual ikan yang menampung ikan-ikan dari nelayan.

Salah satu contoh kasus yang berkenaan dengan penerapan nilai-nilai kepercayaan terhadap sesama nelayan, dapat dilihat dari ilustrasi kisah pendek berikut:

M.Zainuri adalah salah satu informan yang memiliki usaha penampungan ikan dari para nelayan kapal lancang di kawasan pantai Jakat. Usaha ini telah dirintisnya sejak 15 tahun yang lalu, sebelumnya M. Zainuri yang akrab dipanggil Gimin ini juga aktif bergabung dalam kelompok pedagang dari Kelurahan Bajak yang juga masih merupakan kawasan pariwisata pantai jakat. Gimin adalah penduduk asli Pasar Bengkulu.

Pengalamannya terhadap aktivitas kenelayanan dan usaha perdagangan ikan sudah dilakoni sejak kelas 2 SMP. Pada waktu itu Gimin lebih memilih berdagang ikan di Pasar ketimbang harus bersekolah. Dengan berbekal satu meja untuk lapak dagang yang berasal dari orangtuanya, Gimin bisa mengembangkan usahanya sampai memiliki tempat penampungan ikan untuk para nelayan. Para nelayan yang menjadi langganan Gimin ada sekitar 15 orang.

Sistem penjualan yang digunakan juga masih menggunakan asas saling percaya, karena Gimin tidak pernah mencatat berapa jumlah hutang para langganannya, menurutnya: “kito pecayo ajo kek toboko, tobotulah yang ngingekkan hutangnyo kek kito, kito idak ndak pening kek urusan catat mencatat, kelak kalau kito catat, kito tengok berapa hutang orang kek kito, kito ingek, orang tuch belum bayar, pusing jugo kito..kalu nyo ngicu itu urusan dio orang”

Ketika ditanyakan tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh kelompok nelayan ini Gimin mengatakan kebanyakan berasal dari faktor alam, seperti badai dan ombak besar. Untuk menghadapi itu semua alternatif solusi yang Gimin lakukan adalah mencari ikan di tempat lain, seperti wilayah Muko-muko, dan beberapa tempat lainnya. Menurut Gimin Bengkulu ini pantainya terlalu sedikit.

Kisah Gimin di atas menunjukkan adanya “rasa saling percaya”, adanya saling ketergantungan antara kehidupan nelayan dengan penjual ikan, atau dengan “induk semang”. Saling ketergantungan inilah yang menjadikan mereka dapat saling membantu, saling mengisi kekurangan masing-masing pihak.

Kondisi ini sebenarnya juga terjadi di dalam internal kelompok nelayan sendiri. Sesama nelayan saling membantu dalam menjalankan aktifitas keseharian. Hal ini terlihat dari keterangan Bapak Apriansyah (nelayan), yang menyatakan:

“.....Kelompok nelayan ini biasanya berangkat melaut pada pukul 3 pagi dan pulang mendarat pada pukul 2 siang. Diantara nelayan yang melaut ini mempergunakan fasilitas komunikasi HP untuk saling berkomunikasi, sehingga saling memantau keselamatan dalam melaut.Kelompok nelayan ini mempunyai *kesepakatan bersama* untuk menyiapkan satu atau dua buah kapal yang dipergunakan untuk menyusuri dan mencari keberadaan nelayan lain apabila pada jam 2 siang belum mendarat.....”

Penelitian ini juga menemukan fakta bahwa meskipun kelompok nelayan sudah dibentuk cukup lama tetapi sempat mengalami kevakuman kegiatan. Kevakuman inilah yang mendorong anggota untuk melakukan re-organisasi, atau dalam bahasa anggota pembentukan lagi di tahun 2012. Pembentukan ulang kelompok ini bertepatan dengan adanya program bantuan sosial pemerintah kepada kelompok nelayan. Bapak Aulia, yang merupakan salah satu pengurus Kelompok Nelayan Jakat Makmur mengatakan bahwa:

“.....Perlu dikembangkan tiga sasaran nelayan, yaitu nelayan tangkap, nelayan pemasar, dan nelayan pengolah ikan, karena ketiga sasaran tersebut sebenarnya ada saling ketergantungan dalam pekerjaan dan kehidupannya.....Pembentukan

kelompok nelayan semestinya didasari oleh semangat untuk merubah nelayan tradisional menjadi nelayan modern yang mandiri.....”

Pendapat di atas didasari oleh kenyataan, bahwa dalam kenyataannya ada pengkategorian nelayan, yaitu nelayan tangkap, nelayan pemasar, dan nelayan pengolah ikan, kategori ini penting diperjelas, mengingat masing-masing memiliki karakteristik pekerjaan yang khas, dimana sama-sama terkait dengan ikan namun fokus kerjanya berbeda. Sederhananya program pemerintah juga harus mengakomodir situasi ini. Para nelayan juga menyadari pentingnya kelompok sebagai alat untuk membangun kesejahteraannya.

3. Pemerintah

Sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan adalah pihak Pemerintah, melalui kebijakan atau program-program yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Bapak Aulia (pengurus kelompok nelayan) menjelaskan bahwa “Perlindungan terhadap nelayan bisa dilakukan melalui program-program dari Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, dan lain-lain”. Senada dengan pendapat tersebut, Bapak Ahmad Kusen STTP selaku Kepala Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan nelayan tidak mengandalkan dana dari APBD Kota maupun provinsi Bengkulu, karena sangat kecil, tetapi diusahakan juga pendanaan ke Kementerian di Jakarta, dengan persyaratan yang lebih ketat dan harus tepat sasaran..”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga dapat menjadi sumber perlindungan sosial bagi nelayan. Kepala Kelurahan Bajak juga menyatakan bahwa pembentukan kelompok nelayan di tahun 2013 merupakan proses reorganisasi kelompok nelayan yang berdiri tahun 2012, tetapi mengalami “kevakuman”

kegiatan. Reorganisasi tersebut dilakukan berkaitan dengan upaya mendapatkan bantuan pemerintah bagi kelompok nelayan. Bantuan sosial tersebut berupa

perlengkapan melaut, seperti kapal dan jaring penangkap ikan yang diperuntukkan kepada kelompok nelayan.

Tabel 1
Mekanisme Perlindungan Sosial oleh Nelayan

INPUT (MASALAH)	PROSES	OUTPUT (HASIL)	OUTCOME
1. Ketiadaan peralatan melaut (kapal, jaring)	<ul style="list-style-type: none"> • Dipinjami oleh “induk semang” • Pinjaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan mendapat kan peralatan melaut dengan ketentuah hasil melaut disetorkan ke “induk semang” • Nelayan mendapat kan peralatan melaut dengan konsekuensi pinjaman sesuai ketentuan pemberi pinjaman 	Adanya perlindungan bagi nelayan yang tidak memiliki peralatan melaut
2. Risiko kerusakan kapal dan jaring	<ul style="list-style-type: none"> •Menjadi tanggung jawab nelayan dan “induk semang” •Tanggung jawab sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggungan kerugian menjadi lebih ringan • Tanggungan kerugian menjadi berat 	Adanya perlindungan terhadap kapal dan jaring
3. Ketidak-pastian pemasaran hasil tangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> •Ditampung oleh “ induk semang” 	<ul style="list-style-type: none"> • Apapun situasi dan kondisinya, ikan ditampung oleh “induk semang” 	Adanya perlindungan dalam pemasaran tangkapan ikan
4. Ketidak-pastian melaut karena faktor alam (badai, musim paceklik)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan sehari-hari pinjam ke “induk semang” • Melakukan pekerjaan lain (buruh bangun -an, membuat kerajinan tangan, berdagang, dan lain-lain) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari keluarga • Mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lain selain melaut 	Adanya perlindungan dalam ketidakpastian melaut karena faktor cuaca
5. Kelemahan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> •Pembuatan KTP yang secara eksplisit menyebutkan kan pekerjaan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nelayan memiliki adminis- trasi kependudukan yang baik (mendapatkan KTP yang menjelaskan pekerjaan sebagai nelayan) 	Terpenuhinya syarat untuk dapat bantuan sosial dari program pemerintah
6. Rawan konflik	<ul style="list-style-type: none"> •Membentuk kelompok nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kepercayaan, kekerabatan dan gotong royong 	Adanya perlindungan dari konflik
7. Keberadaan kapal <i>trawl</i> yang menggunakan pukot harimau	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan kepada pihak berwajib • Melakukan kekerasan untuk mengusir kapal <i>trawl</i> pukot harimau dari perairan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi kapal <i>trawl</i> pukot harimau diatur tidak melanggar wilayah operasi kapal nelayan kecil • Kapal <i>trawl</i> /pukot harimau tidak lagi beroperasi di wilayah perairan nelayan kecil 	Adanya perlindungan dari keberadaan kapal <i>trawl</i> dengan pukot harimau

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2013

Matrik tersebut memperlihatkan secara ringkas tentang mekanisme perlindungan sosial yang dilakukan oleh pekerja sektor informal untuk mengatasi berbagai hambatan dari risiko-risiko pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Suharto (halaman 2006:167), menyatakan, bahwa dalam arti luas:

.....“Perlindungan sosial dapat diartikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap risiko-risiko kehidupan (*lifelihood*), dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.”.....

Upaya-upaya perlindungan sosial, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, pada hakekatnya bertujuan untuk:

1. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan
2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial
3. Memungkinkan kelompok-kelompok rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat

Berdasarkan permasalahan/kebutuhan nelayan di Kawasan pantai Jakat Kota Bengkulu, potensi/kemampuan dan sumber yang bisa dimanfaatkan dalam perlindungan sosial bagi nelayan tersebut, maka dirumuskan model perlindungan sosial bagi Kelompok Nelayan Jakat Makmur Kelurahan Bajak. Model perlindungan sosial ini pada dasarnya merupakan pengorganisasian mekanisme perlindungan sosial yang dilakukan “induk semang” yang dipadukan dengan penguatan kapasitas kelompok nelayan. Sebagaimana hasil penelitian ini sudah menunjukkan bahwa

di kalangan nelayan ada istilah “induk semang”, yaitu orang yang meminjamkan uang dan atau peralatan melaut (kapal, jaring) sekaligus juga menampung hasil melaut nelayan.

Mekanisme “induk semang” tersebut pada dasarnya merupakan potensi dan sumber upaya perlindungan sosial bagi kelompok nelayan, apalagi mengingat keterbatasan upaya perlindungan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian secara tidak langsung, mekanisme “induk semang” ini merupakan “strategi bertahan” nelayan dalam menghadapi berbagai kerentanan-kerentanan ekonomi maupun sosial.

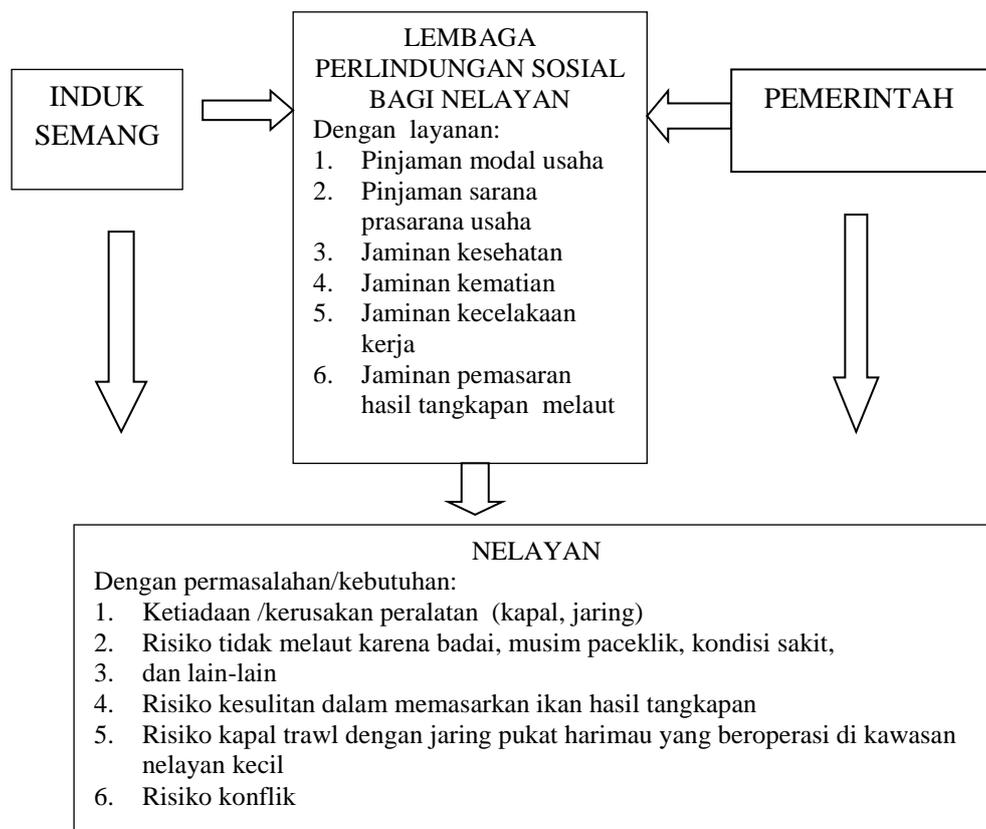
Meskipun demikian model perlindungan sosial yang secara alamiah telah dilakukan oleh “induk semang” ini juga mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan, diantaranya:

1. Tidak adanya administrasi pencatatan yang rapi, yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat antara induk semang dengan nelayan yang menerima bantuan. Pencatatan yang teratur akan menjamin kepastian jumlah dan jangka waktu peminjaman yang diberikan oleh induk semang kepada nelayan. Selama ini proses pinjam meminjam yang dilakukan lebih mengandalkan ingatan semata, sehingga rawan terjadi kekeliruan. Situasi ini berpotensi menimbulkan prasangka yang dapat merusak hubungan antara induk semang dan nelayan yang telah terjalin baik.
2. Mekanisme perlindungan sosial yang dilakukan oleh induk semang dilakukan semata-mata atas dasar “kepercayaan” dan “amal kebaikan”. Dengan demikian kondisinya sangat tergantung pada “subjektifitas” induk semang. Apabila induk semang tidak berkeinginan membantu, maka nelayan akan mengalami kesulitan.

Di sisi lain, penelitian juga memperlihatkan adanya solidaritas yang kuat di antara nelayan. Solidaritas inilah yang mendorong pembentukan kelompok nelayan. Pemahaman tentang pentingnya kelompok sebagai media untuk mencapai tujuan bersama ini jugalah yang mendorong Kelompok Nelayan Jakat Makmur untuk melakukan reorganisasi kembali pada tahun 2013, setelah mengalami kevakuman kegiatan beberapa tahun lamanya. Pembentukan kelompok nelayan ini pada dasarnya merupakan upaya pengorganisasi

nelayan dalam menghadapi berbagai risiko-risiko yang dialami dalam kehidupannya.

Keberadaan “induk semang” dan “kelompok nelayan” tersebut apabila dipadukan akan menjadi mekanisme perlindungan sosial yang baik bagi kelompok nelayan. Secara ringkas model tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Bagan 1
Model Perlindungan Sosial bagi Kelompok Nelayan Jakat Makmur
Kelurahan Bajak Kota Bengkulu

Bagan 1 diatas menjelaskan bahwa perlu adanya suatu kelembagaan yang melaksanakan perlindungan sosial bagi nelayan. Kelembagaan tersebut melibatkan pihak pemerintah, induk semang dan juga nelayan. Kelembagaan perlindungan sosial tersebut memberikan layanan-layanan perlindungan sosial yang disepakati bersama oleh ketiga pihak tersebut, diantaranya: (1)

- Pemberian pinjaman modal usaha;
- (2) Pemberian pinjaman sarana prasarana usaha;
- (3) Jaminan kesehatan;
- (4) Jaminan kecelakaan kerja;
- dan (5) Jaminan kematian.

Dengan berbagai layanan yang ada, maka kerentanan-kerentanan nelayan seperti; ketiadaan /kerusakan peralatan (kapal, jaring),

resiko tidak melaut karena badai, musim paceklik, kondisi sakit, resiko kesulitan dalam memasarkan ikan hasil tangkapan, resiko keberadaan kapal trawl yang menggunakan pukot harimau, yang beroperasi di kawasan nelayan kecil, serta resiko konflik, dapat tertangani dan terantisipasi dengan baik.

Metode pengembangan masyarakat yang menekankan adanya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalahnya juga menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini, sehingga sejak awal proses pemetaan masalah/kebutuhan, proses pemetaan potensi/kemampuan sumber yang dapat dimanfaatkan, peneliti mendorong partisipasi aktif pekerja sektor informal seperti melalui kegiatan diskusi kelompok terfokus. Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa pekerja sektor informal itulah yang paling mengetahui permasalahan/kebutuhan yang mereka alami, terutama di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu.

Simpulan

Nelayan adalah salah satu pekerja sektor informal yang ada di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu. Sebagaimana karakteristik pekerja sektor informal lainnya, nelayan tradisional ini umumnya mengalami berbagai permasalahan/kebutuhan yang terwujud dalam bentuk kerentanan-kerentanan ekonomi dan sosial, baik yang terjadi secara alamiah maupun akibat interaksi sosial yang kurang baik. Beberapa permasalahan yang biasa dihadapi seperti kerentanan akibat kondisi alam yang tidak menentu (badai), risiko kerusakan/hilangnya kapal dan jaring, risiko adanya kapal *trawl* dengan jaring pukot harimau, risiko karena hasil tangkapan ikan sedikit. Kondisi ini mempertegas bahwa kelompok nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu membutuhkan upaya-upaya perlindungan sosial dalam kehidupannya.

Selain dari permasalahan yang dihadapi, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kelompok nelayan tersebut juga mempunyai potensi, kemampuan dan sumber perlindungan sosial untuk mengantisipasi risiko-risiko yang

ada, seperti pembentukan kelompok nelayan, kelompok pedagang, adanya “induk semang” bagi nelayan-nelayan yang tidak mempunyai kapal dan jaring sendiri, adanya jaminan kesehatan masyarakat dari pemerintah, dan berbagai bantuan pemerintah. Oleh karena itu, dengan menyanggah antara permasalahan.kebutuhan dan potensi yang dimiliki ini, maka dirumuskan model perlindungan sosial bagi nelayan di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu, berupa pengorganisasian sistem “induk semang” yang dipadukan dengan penguatan kapasitas kelompok nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Kawasan pantai Jakat Kota Bengkulu, maka peneliti merekomendasikan:

1. Rekomendasi kepada Pemerintah

Upaya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal di Kawasan pantai Jakat Kota Bengkulu bukan hanya menjadi tanggung jawab pekerja sektor informal tersebut sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberikan regulasi dan juga program-program yang menjamin adanya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal. Program tersebut bisa berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, bantuan modal usaha, bantuan perlengkapan nelayan, dan tidak kalah penting adalah adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekerja sektor informal yang bisa dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan.

2. Rekomendasi kepada Pekerja Sektor Informal

Sebagai pihak yang mengalami berbagai kerentanan-kerentanan baik ekonomi maupun sosial, maka pekerja sektor informal harus aktif dan inovatif dalam membangun mekanisme perlindungan sosial. Upaya perlindungan sosial tersebut semestinya diwujudkan dengan pengorganisasian kelompok, pengorganisasian mekanisme perlindungan

sosial, yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan komunitas, dan transparansi pengelolaan program sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

3. Rekomendasi kepada Induk Semang Mekanisme perlindungan sosial yang dilakukan oleh “induk semang” saat ini bisa menjadi rintisan bagi mekanisme perlindungan sosial yang lebih terorganisir

dan lebih luas jangkauan penerima manfaatnya. Atas dasar tersebut, maka dipandang perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara “induk semang”, pekerja sektor informal, dan pemerintah sebagai upaya membangun mekanisme perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal di Kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu.

Daftar Pustaka

- Bambang Rudito dan Melia Famiola. 2008. *Sosial Mapping Metode Pemetaan Sosial Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- 2007. *Bunga Rampai Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial*. Bandung: STKS Press.
-2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. 2006. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2006. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development Edisi ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Isbandi Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: FE-UI.
- Millen, Anelli. 2006. *Capacity Building (terjemahan bebas)*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Millen, Anneli. 2006. *Capacity Building*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Netting, Ellen, dkk. 1993. *Praktek Makro Pekerjaan Sosial (terjemahan)*. New York: Longman.
- Netting, Ellen, F, Kettner, Peter M, dan Mc Murtry, Steven L. 2004. *Sosial Work; Third Edition A Profession of Many Faces*. London: Allyn and Bagon Inc.
- Neuman, W. L. 2000. *Sosial Research Methods; Quantitative and Qualitative Approaches, Fourth Edition*. USA: A Pearson Education Company.
- Nurul Zuriah. 2003. *Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*. Malang: Bayumedia Publising.
- Payne, Malcolm. 1995. *Sosial Work and Community Care*. London: Macmillan.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

..... 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suwarsih Madya, P. 2007. *Teori dan Praktek Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.